



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA

Jalan Yahim No. 49, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura 99352

TELEPON (0967)592179, FAX (0967)591235

WEBSITE : <https://papua.brmp.pertanian.go.id>, email: brmp.papua@pertanian.go.id, brmppapua@yahoo.com, brmppapua@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

Nomor: B-22/Kpts/OT.210/H.12.28/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BALAI BESAR MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

- Menimbang : a. bahwa upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Balai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444)

- 8 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Nomor 881 Tahun 2025);
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);
- 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 128/Kpts./HK.150/M/02/2026 Tanggal 4 Februari 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 Tanggal 12 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lapiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana diktum SATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Memberi dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

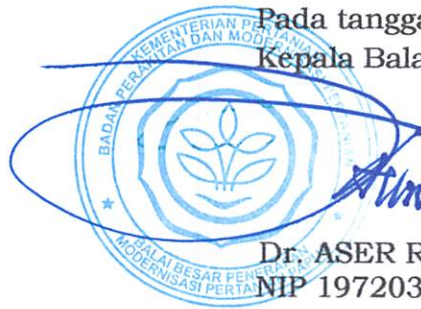
2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 21 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. ASER ROUW, SP., M.Si
NIP 197203161999031002

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta;
2. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Papua
Nomor : B- 22/Kpts/TU.120/H.12.28/02/2026
Tanggal : 21 Februari 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) TAHUN ANGGARAN 2026

- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Penanggung Jawab | : | Dr. Aser Rouw, SP., M.Si |
| Ketua Tim | : | Muhammad Yasin, ST., MM. |
| Sekretaris 1 | : | Ressa Rindiani, SM |
| Sekretaris 2 | : | Berliana Wilaya Bakti |
-
- | | | |
|--|---|--|
| 1. Kelompok Kerja Area
Manajemen
Perubahan | : | Ketua : Rita Sahara, SE |
| | : | Anggota : 1. Ni Komang Reni Utami Dewi, SE |
| | | 2. Rosita Marlina Iriani Kelyanin, SE |
| | | 3. Yuliana Monika Sineri, SE |
| | | 4. Jeane Marshely Sinay, S.Si |
-
- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 2. Kelompok Kerja Area
Penataan Tata
Laksana | : | Ketua : Dr. Ir. Siska Tirajoh, M.Si |
| | : | Anggota : 1. Yusuf Suebu, S.ST, M.Si |
| | | 2. Robert Mangisi Limbong, A.Md |
| | | 3. Dimas Kumara Setiawan, S.Si |
| | | 4. Alfrida Daimoe |
-
- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 3. Kelompok Kerja Area
Area Penataan Sistem
Manajemen SDM | : | Ketua : Dr. Ir. Batseba M.W. Tiro, MP |
| | : | Anggota : 1. Dimas Hanafi, A.Md |
| | | 2. Meitty Persulesy, A.Md. |
| | | 3. Bertha Oppy Felle |
| | | 4. Maria Sinon, S.E. |
-
- | | | |
|--|---|---|
| 4. Kelompok Kerja Area
Penguatan
Akuntabilitas Kinerja | : | Ketua : Ghalih Priyo Dominanto, S.Pt., MP |
| | : | Anggota : 1. Sitti Raodah Garuda, SP |
| | | 2. Yuliana Helena Rumsarwir, SP., M.Si |
| | | 3. Fransiskus Palobo, SP., S.Sos., M.Si |
| | | 4. Maison Sigalingging, S.T.P. |
| | | 5. Erlyn Monica Mambor, S.P. |
-
- | | | |
|---|---|---|
| 5. Kelompok Kerja Area
Penguatan
Pengawasan | : | Ketua : Siti Nur Jannah, A.Md. Ak |
| | : | Anggota : 1. Dr.Ir.Martina Sri Lestari, MP. |
| | | 2. Septi Wulandari, SP., M.Sc |
| | | 3. Eko Binti Lestari, S.ST |
| | | 4. Andre Pasopati Purba, S.Kom |
| | | 5. Jeriston Parinding, A.Md.P |
-
- | | | |
|--|---|--|
| 6. Kelompok Kerja Area
Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik | : | Ketua : Dr.Rohimah Handayani, SP., M.Sc |
| | : | Anggota : 1. Edison Ayakeding, S.ST., M.Si |
| | | 2. Merlin Kornelia Rumbarar, SP., M.Sc |

3. Asriyani, S.Si
4. Putri Hanny Meilisa Pasaribu, SH
5. Marice Merahabia, SIP

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 21 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Aser Rouw, SP., M.Si /
NIP 197203161999031002

Lampiran 2 : Surat Keputusan Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
Nomor : B- 22/Kpts/TU.120/H.12.28/3/2026
Tanggal : 21 Februari 2026

**URAIAN TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANAI (WBBM) TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Penanggung Jawab, bertugas:

- Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) kepada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

B. Ketua Tim, bertugas:

- Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Melakukan koordinasi dengan kelompok Kerja Area I s/d Area VI dan Tim Survey, menerima bukti-bukti (eviden) dari masing-masing kelompok kerja dan tim survey dalam bentuk softcopy dan hardcopy guna dokumentasi dan arsip.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan tim survey dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua sebagai Penanggung Jawab Zona Integritas.

C. Sekretaris:

- Mengelola dan mendukung pelaksanaan pembangunan ZI dalam mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- Mengumpulkan dan menyimpan dokumen-dokumen yang menjadi data dukung pencapaian ZI.
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala, termasuk pelaksanaan program-program prioritas.
- Memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan ZI berjalan konsisten sesuai dengan rencana.

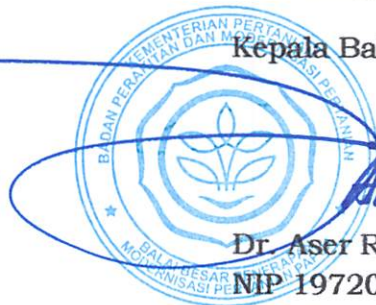
- Mengumpulkan dan mengkompilasi Laporan Kerja Evaluasi (LKE) dari berbagai area dalam tim ZI untuk diupload di Google Drive.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan ZI kepada pimpinan.

D. Kelompok Kerja (Area I s/d Area VI), bertugas:

- Mensosialisasikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada area kerja masing-masing di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (eviden) pada area kerja masing-masing dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- Melakukan survey kualitas pelayanan kepada masyarakat (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP).
- Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran dari masyarakat.
- Tim Survey bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai hasil survey.
- Menganalisis hasil survey sebagai rekomendasi perbaikan.
- Membuat laporan hasil survey dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab (Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua).

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 21 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si /
NIP 197203161999031002